



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: SK.529/Menlhk/Setjen/PKL.2/8/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR
DAN ALOKASI BEBAN PENCEMARAN AIR SUNGAI ASAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf a Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pemerintah berwenang menetapkan daya tampung beban pencemaran;
 - b. bahwa berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019, Daerah Aliran Sungai Asahan termasuk Daerah Aliran Sungai Prioritas untuk perlindungan dan pengelolaan kualitas air;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air dan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Asahan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR DAN ALOKASI BEBAN PENCEMARAN AIR SUNGAI ASAHAN.

KESATU : Menetapkan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Sungai Asahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Asahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Pemetaan segmentasi Daerah Aliran Sungai Asahan dalam penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dan alokasi beban pencemaran air sebagaimana dimaksud

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KEEMPAT : Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dan Alokasi Beban Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA menjadi dasar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan:
1. izin lingkungan dan izin pembuangan air limbah;
 2. izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan;
 3. baku mutu air limbah; dan
 4. mutu air sasaran.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2019

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA



Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,

MAMAN KUSNANDAR

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Para Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Gubernur Sumatera Utara.
3. Bupati Toba Samosir.
4. Bupati Asahan.
5. Wali Kota Tanjungbalai.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: SK.529/Menlhk/Setjen/PKL.2/8/2019

TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR DAN ALOKASI BEBAN PENCEMARAN AIR SUNGAI ASAHAN

DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR SUNGAI ASAHAN

Segmen	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Beban PENCEMARAN BOD Eksisting (kg/hari)	Daya Tampung BEBAN PENCEMARAN BOD (kg/hari)	Penurunan BEBAN PENCEMARAN BOD (kg/hari)	Penurunan BEBAN PENCEMARAN BOD Per Segmen (kg/hari)	Persentase Penurunan BEBAN BOD per segmen
1.	Kabupaten Toba Samosir	1. Lumban Julu 2. Porsea 3. Habinsaran 4. Silaen 5. Laguboti	22.292,40	9.635,31	12.657,09	12.657,09	10,53%
2.	Kabupaten Asahan	1. Bandar Palu 2. Pulau Rakyat 3. Sei Kepayang	52.213,60	568,29	51.645,31	107.497,69	89,47%

Segmen	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Beban Pencemaran BOD Eksisting (kg/hari)	Daya Tampung Beban Pencemaran BOD (kg/hari)	Penurunan Beban Pencemaran BOD (kg/hari)	Penurunan Beban Pencemar BOD Per Segmen (kg/hari)	Persentase Penurunan Beban BOD per segmen
		4. Simpang Empat 5. Air Batu 6. Batu Pane					
3.	Kota Tanjungbalai	1. Datuk Bandar 2. Tanjungbalai Selatan	55.863,30	10,92	55.852,38		
Total			130.369,30	10.214,52	120.154,78	120.154,78	100%

Sahman sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA Biro HUKUM,

 MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: SK.529/Menlhk/Setjen/PKL.2/8/2019

TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR DAN ALOKASI BEBAN PENCEMARAN AIR SUNGAI ASAHAN

ALOKASI BEBAN PENCEMARAN AIR SUNGAI ASAHAN

Segmen	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Penurunan Beban Pencemaran BOD Per Sumber Pencemar (kg/hari)			
			Domestik*	NPS**	Peternakan	Industri***
1	Kabupaten Toba Samosir	1. Lumban Julu	723,48	11.000,65	870,54	62,42
		2. Porsea				
		3. Habinsaran				
		4. Silaen				
		5. Laguboti				
2	Kabupaten Asahan	1. Bandar Palu	26.017,81	4.722,79	18.455,18	2.449,53
		2. Pulau Rakyat				
		3. Sei Kepayang				
		4. Simpang Empat				
		5. Air Batu				
		6. Batu Pane				

Segmen	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Penurunan Beban Pencemaran BOD Per Sumber Pencemar (kg/hari)			
			Domestik*	NPS**	Peternakan	Industri***
2	Kota Tanjungbalai	1. Datuk Bandar 2. Tanjungbalai Selatan	40.091,68	5.028,16	10.390,85	341,69
Total			66.832,97	20.751,59	29.716,58	2.853,65

Keterangan:

* Domestik terdiri dari air limbah rumah tangga dan sampah

** NPS (*Non Point Source*) merupakan penggunaan lahan dari kegiatan pertanian sawah dan perkebunan

*** Industri merupakan kegiatan industri besar

selain sesuai dengan aslinya
 DR. KURNIAWATI
 KEPALA BIRO HUKUM,



TAMAM KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III

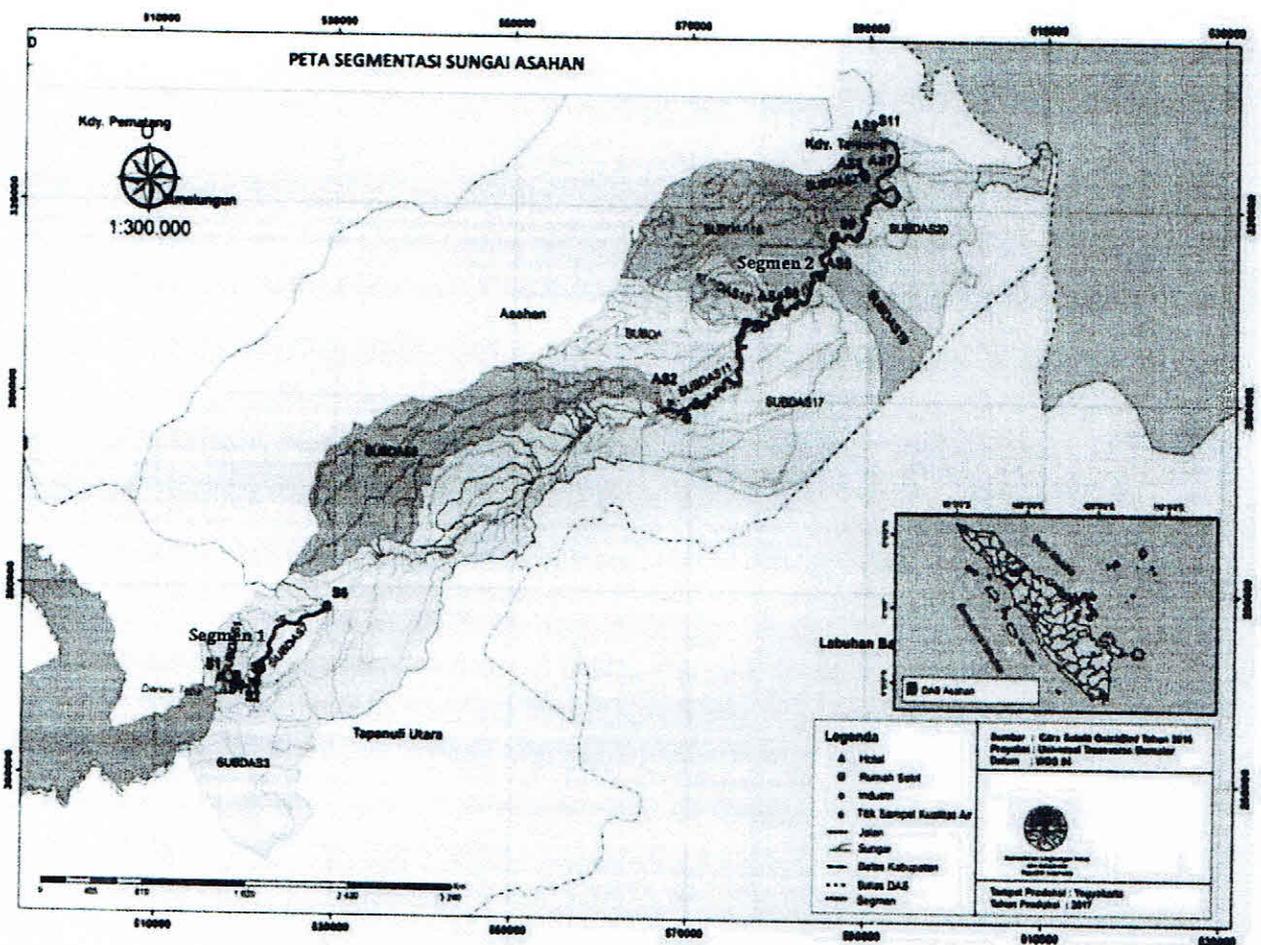
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: SK.529/Menlhk/Setjen/PKL.2/8/2019

TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR DAN ALOKASI
BEBAN PENCEMARAN AIR SUNGAI ASAHAN

PETA SEGMENTASI DAERAH ALIRAN SUNGAI ASAHAN



Sesuai dengan aslinya
PI. KEPALA BIRO HUKUM,



MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA